

### **BAB III**

#### **“PINJAMAN BERGULIR” DALAM KERANGKA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

##### **A. Tinjauan Umum Tentang “Pinjaman bergulir” dalam PNPM MP**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kadang dapat dilakukan sendiri, namun seringkali harus diusahakan bersama sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat.

Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya. Lembaga-lembaga itu dapat dibedakan ke dalam lembaga profit dan non profit. Lembaga profit adalah lembaga yang bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan Lembaga Non Profit adalah lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba semata di dalam kegiatannya. Namun dalam pelaksanaannya lembaga non profit sering membentuk organisasi profit di dalamnya yang merupakan satu bagian dari lembaga Non Profit dengan tujuan untuk memperoleh laba yang akan digunakan menunjang pencapaian tujuan umum organisasi non profit tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu lembaga non profit yang didalamnya

memperoleh laba untuk menunjang pencapaian tujuan yaitu program Pemerintah yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan memberikan kepercayaan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk mengelola salah satu program dalam pencapaian tujuannya. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah organisasi non profit, namun LKM memiliki Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertujuan memperoleh laba untuk menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan “Pinjaman Bergulir” yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dalam pengelolannya pemerintah membuat suatu program yang menunjang misi utama LKM yaitu menanggulangi kemiskinan. Program ini dinamakan “Pinjaman jasa Bergulir” yaitu salah satu dari program kerja PNPM Mandiri Perkotaan .

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah suatu program pemerintah yang beroperasi dalam penganggulangan kemiskinan yang bergerak dalam bidang sosial, ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Penganggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Dalam kegiatan ekonomi, diwujudkan dengan kegiatan “Pinjaman

bergulir”, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pedoman ini hanya mengatur ketentuan pokok untuk pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir”, namun keputusan untuk melaksanakannya diserahkan sepenuhnya kepada warga masyarakat setempat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberian “Pinjaman Bergulir” di P2KP, diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” di awal program kinerjanya sangat buruk. Namun dengan pemberian panduan operasional serta petunjuk pembukuan untuk UPK, kinerja kegiatan “Pinjaman Bergulir” semakin membaik. Berbagai kesuksesan P2KP yaitu adanya unsur keswadayaan masyarakat. Sehingga proyeknya jadi lebih murah dan manfaatnya sangat dirasakan. Program ini menjadi sangat strategis karena didasari kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat .dengan serangkaian siklusnya harus dipahami dan dimaknai sebagai proses pembelajaran masyarakat untuk melakukan pemberdayaan lingkungannya, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi serta kegagalan yang berupa pandangan masyarakat tentang program P2KP masih melekat bahwa P2KP hanyalah “program bagi-bagi duit gratis”. Kegagalan penarikan kredit yang disalurkan melalui program P2KP pada periode tahun 2006 menunjukan bahwa pandangan masyarakat masih belum berubah. P2KP bagaikan program untuk korupsi masal, yang sulit untuk di berantas dan di

telurur siapa yang menjadi tersangka. Dalam pengalaman tersebut, kegiatan “Pinjaman Bergulir” di masa lalu dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kelanjutan kegiatan “Pinjaman Bergulir” melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

Beberapa pertimbangan dalam melanjutkan pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan antara lain :

1. Tersedianya akses dan jasa layanan keuangan yang berkelanjutan telah terbukti merupakan salah satu alat efektif untuk membantu rumah tangga miskin meningkatkan pendapatan dan kekayaannya
2. Akses rumah tangga miskin ke jasa layanan keuangan formal masih sangat rendah. Sekitar 29 juta rumah tangga miskin masih belum mendapat akses ke jasa layanan keuangan formal. (*sumber Johnston dan Holloch*) (dalam pedoman teknis PNPM MP 2007, hlm. 2)
3. “Pinjaman Bergulir” PNPM Mandiri Perkotaan memiliki peluang dapat menjangkau sekitar 2,5 juta rumah tangga miskin yang sama sekali belum menerima akses ke lembaga keuangan
4. Permintaan “Pinjaman Bergulir” pada rencana pembangunan masyarakat masih tinggi.

Pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada

rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan. Peran PNPM hanya membangun dasar-dasar solusi yang berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat kelurahan.

PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk menentukan masa depan UPK.

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah rumah tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan atau desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin.

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian “Pinjaman Bergulir” yang perlu mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah:

1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dialokasikan untuk kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah milik masyarakat kelurahan atau desa sasaran dan bukan milik perorangan;
2. Tujuan dipilihnya kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perkotaan
3. Pengelolaan “Pinjaman Bergulir” berorientasi kepada proses pembelajaran untuk penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
4. Pengelolaan “Pinjaman Bergulir” dipisahkan antara LKM sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;
5. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian “Pinjaman Bergulir” standar yang ditetapkan
6. Manajer dan Petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan;

7. UPK telah mempunyai sistim pembukuan yang standar dan sistim pelaporan keuangan yang memadai;

UPK mendapat pengawasan baik oleh LKM melalui Pengawas UPK maupun Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) melalui tenaga ahli dan fasilitator, atau pihak yang ditunjuk proyek.

Pedoman pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” ini adalah pedoman dasar yang menjadi pegangan fasilitator dan pihak-pihak terkait (pelaku PNPM Mandiri Perkotaan) dalam mengawal pelaksanaan kegiatan “Pinjaman Bergulir” oleh UPK. Pedoman pelaksanaan ini hanya berisi pokok-pokok kegiatan yang harus dipahami dalam memberikan pendampingan kepada LKM, UPK dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Sedangkan panduan kegiatan yang lebih rinci dapat dilihat dalam pedoman teknis terkait yang secara lengkap terdiri dari : (dilampirkan dibelakang)

1. Pedoman Teknis “Pinjaman Bergulir”
2. Pedoman Teknis Keorganisasian LKM
3. Pedoman Teknis Pembukuan UPK
4. Pedoman Teknis Pengelolaan Kas UPK
5. Pedoman Teknis Pengawasan UPK
6. Membangun Kepribadian Wirausaha
7. Memperkokoh Kepribadian Wirausaha

## **B. Prinsip-prinsip “Pinjaman Bergulir” dalam PNPM MP**

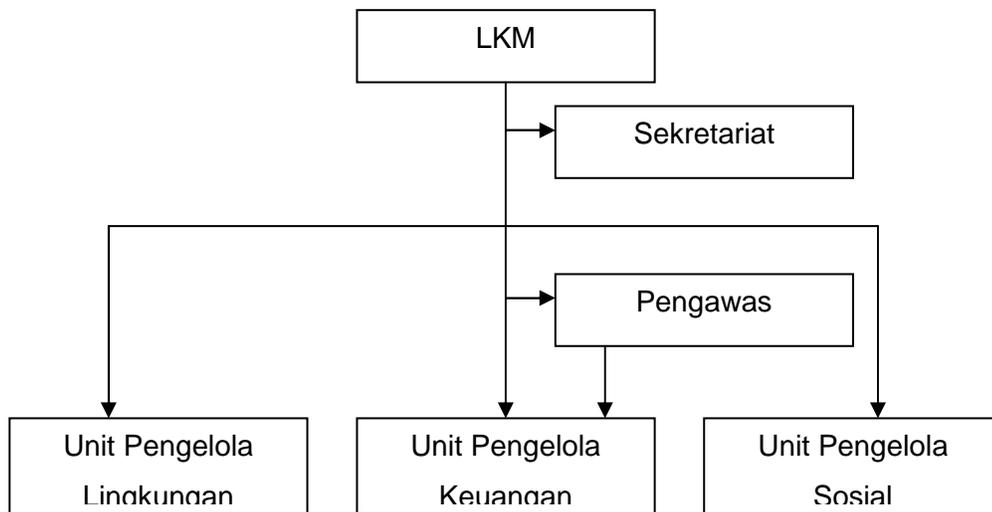
Di dalam pedoman teknis “Pinjaman bergulir” diatur mengenai bagaimana mengelola “Pinjaman Bergulir” di UPK. Aturan tersebut menyangkut mengenai kriteria pengelola dan penerima “Pinjaman Bergulir”, Skim “Pinjaman Bergulir”, tahapan pemberian pinjaman, pembukuan “Pinjaman Bergulir”, monitoring “Pinjaman Bergulir”, penyelesaian pinjaman yang bermasalah serta pelaporan “Pinjaman Bergulir”.

Secara singkat aturan pokok yang diatur dalam pedoman teknis “Pinjaman Bergulir” antara lain :

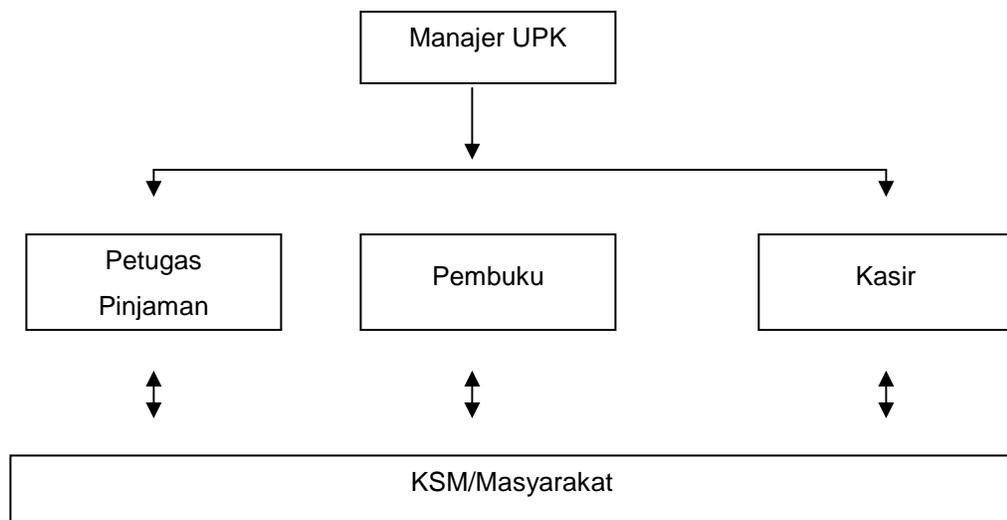
### **1. Kelayakan Lembaga Pengelola “Pinjaman bergulir”**

Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh LKM maupun UPK sesuai dengan kriteria kelayakan yang disebutkan berupa kelayakan lembaganya. Lembaga yang langsung mengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK adalah salah satu Unit Pengelola dari 3 Unit Pengelola yang berada dibawah LKM. Dua unit pengelola lainnya adalah Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Struktur lengkap LKM sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI LKM



## STRUKTUR ORGANISASI UPK



Sebelum kegiatan “Pinjaman Bergulir” dalam kelurahan yang bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan, baik untuk LKM/UPK, maupun untuk anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan. Kegiatan “Pinjaman Bergulir” dapat dilaksanakan, hanya jika para pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan seperti yang dijelaskan di bawah. KMW bertanggungjawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan LKM/UPK. Sedangkan fasilitator bersama relawan setempat bertanggungjawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan kelompok maupun anggotanya.

a. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

LKM yang akan mengelola kegiatan “Pinjaman Bergulir” harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

- 1) LKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan dan memiliki Anggaran Dasar (AD) yang di dalamnya antara lain menyatakan bahwa:
  - a) Kegiatan “Pinjaman Bergulir” akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya
  - b) Dana “Pinjaman Bergulir” hanya diperuntukkan untuk kegiatan “Pinjaman Bergulir” saja

- c) Pendapatan UPK hanya untuk membiayai kegiatan operasional UPK dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan lainnya, termasuk biaya LKM dan Pengawas.
- 2) LKM telah mengangkat Pengawas UPK (2–3 orang) dan petugas UPK (minimal 2 orang). Semua telah memperoleh pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki uraian tugas dan tanggungjawab.
  - 3) LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan dasar “Pinjaman Bergulir” yang memuat kriteria KSM dan anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung renteng anggota KSM.
  - 4) Untuk kelurahan atau desa lama (yang telah menjalankan P2KP) :
    - a) Kinerja “Pinjaman Bergulir” yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko <10%, pinjaman berisiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125% dan hasil investasi >10%.
    - b) Bersedia melakukan perbaikan kelembagaan antara lain:
      - 1) Membentuk pengawas UPK

- 2) LKM telah menerima pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan
- 3) Telah memiliki rekening atas nama LKM dengan kewenangan menandatangani 3 orang

b. Pengawas UPK

Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK dalam mengelola “Pinjaman Bergulir” telah memenuhi kriteria minimal antara lain :

- 1) Telah diangkat oleh LKM dengan persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-laki dan perempuan
- 2) Telah memiliki uraian tugas yang mencakup tugas dan tanggungjawab pengawas
- 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan

c. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana “Pinjaman Bergulir” telah memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

- 1) Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang)
- 2) Telah memiliki uraian tugas dan tanggungjawab

- 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan
- 4) Telah memahami aturan dasar “Pinjaman Bergulir”
- 5) Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan penandatanganan 3 orang
- 6) Telah memiliki sistem pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan
- 7) Untuk kelurahan/desa lama (yang telah menjalankan P2KP dan PNPM Mandiri Perkotaan):
  - a) Kinerja “Pinjaman Bergulir” yang dijalankan mencapai kriteria memuaskan; peminjam berisiko <10%, pinjaman berisiko <10%, ratio pendapatan biaya > 125%, hasil investasi >10%.
  - b) Kinerja Pembukuan UPK minimal memadai

## 2. Kelayakan Penerima “Pinjaman Bergulir”

Kriteria kelayakan yang harus dipenuhi oleh KSM beserta anggotanya sesuai dengan kriteria kelayakan. KSM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat “Pinjaman Bergulir” dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata lain, KSM peminjam dan

anggotanya yang tidak atau belum memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada pendampingan terlebih dahulu sampai KSM peminjam tersebut memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam.

a. Kriteria kelayakan KSM

- 1) KSM telah terbentuk dan anggotanya adalah warga miskin serta seluruh anggota telah memperoleh pembekalan tentang pembukuan KSM, “Pinjaman Bergulir” (persyaratan peminjam, skim pinjaman, tanggung renteng, dan tahapan peminjaman), kewirausahaan serta telah melakukan kegiatan menabung diantara anggota KSM.
- 2) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan kekuatan modal sosial;
- 3) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan;
- 4) Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh LKM/Masyarakat.
- 5) Jumlah anggota KSM minimal 5 orang;
- 6) Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan
- 7) Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan

- 8) Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan dituangkan secara tertulis dalam pernyataan kesanggupan tanggung renteng.
- 9) Semua anggota KSM telah memeproleh dari fasilitator dan LKM/UPK

b. Kriteria kelayakan anggota KSM

- 1) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
- 2) Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakati sendiri oleh masyarakat;
- 3) Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota yang lain.
- 4) Semua anggota KSM telah mempunyai tabungan minimal 5 % dari pinjaman yang diajukan dan bersedia menambah tabungannya minimal 5 % selama jangka waktu pinjaman dan tidak akan mengambil tabungan tersebut sebelum pinjamannya lunas (tidak wajib).
- 5) Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;
- 6) Belum pernah mendapat pelayanan dari lembaga keuangan yang ada.

### Skim “Pinjaman Bergulir”

Skim Pinjaman yang diatur dalam “Pinjaman Bergulir” antara lain :

- 1) Peminjam adalah KSM dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan
- 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha
- 3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola *channeling* dengan lembaga keuangan atau bank lainnya), frekuensi peminjaman maksimal 4 kali.
- 4) Jangka waktu pinjaman 3-12 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam
- 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa *grace period* (tenggang waktu)

- 6) Jasa pinjaman 1,5 s/d 3 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula. Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK.<sup>34</sup>

### 3. Tahapan Pemberian “Pinjaman Bergulir”

Dalam pemberian “Pinjaman Bergulir”, diatur kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap tahapan sebagai berikut:

#### 1) Tahap Pengajuan Pinjaman

Calon peminjam mempersiapkan segala keperluan yang dipersyaratkan untuk memperoleh pinjaman, baik pelatihan, pembentukan simpanan, maupun kelengkapan dokumen dan pengisian blanko pengajuan pinjaman.

Pada tahap pengajuan, petugas UPK wajib menjelaskan ketentuan “Pinjaman Bergulir” termasuk bahwa pinjaman ini sifatnya adalah hutang yang harus dibayar kembali, bukan hibah

#### 2) Tahap Pemeriksaan Pinjaman

Petugas pinjaman UPK memeriksa dokumen pengajuan pinjaman yang diajukan KSM beserta anggotanya baik secara administratif maupun kunjungan lapangan menganalisis dan membuat usulan atau

---

<sup>34</sup> Desa Gondang 1,7 % dan Desa Galang Pengampon tidak ada ketentuan nominal dalam pengembalian pinjamannya

rekomendasi kepada Manajer UPK atas permohonan pinjaman dimaksud.

### 3) Tahap Putusan Pinjaman

Manajer UPK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh KSM didasarkan pada hasil analisis petugas pinjaman UPK.

### 4) Tahap Realisasi Pinjaman

Permohonan pinjaman KSM yang telah disetujui oleh manajer UPK disiapkan dokumen untuk pencairan, kemudian direalisasikan atau dicairkan pembayarannya kepada KSM dan anggotanya.

Pada tahap realisasi petugas UPK juga wajib kembali menegaskan dan menjelaskan semua ketentuan “Pinjaman Bergulir” termasuk ketentuan bahwa “Pinjaman Bergulir” adalah utang yang wajib dibayar kembali dan bukan hibah.

### 5) Tahap Pembinaan Pinjaman

Minimal 1 bulan setelah pinjaman direalisasi petugas UPK wajib memantau keadaan peminjam, perkembangan usaha dan penggunaan pinjaman apakah digunakan sesuai tujuan semula.

Pada tahapan ini petugas juga wajib mengingatkan peminjam tentang kewajiban angsuran yang harus dilakukan dan juga mengingatkan kembali bahwa pinjaman ini adalah utang bukan hibah.

#### 6) Tahap Pembayaran Kembali Pinjaman

Peminjam melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya. Agar tidak sampai terjadi keterlambatan atau tunggakan, maka petugas UPK beberapa hari sebelum waktu pembayaran wajib mengingatkan peminjam atas kewajibannya. Dalam melaksanakan tugas ini petugas UPK dapat dibantu oleh relawan, aparat kelurahan/desa, tokoh masyarakat maupun pengawas UPK.<sup>35</sup>

### **C. Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka PNPM MP Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Program PNPM MP dalam hal “Pinjaman Bergulir” dilaksanakan diberbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Namun penulis akan mengambil contoh di Kecamatan Wonopringgo yang mempunyai banyak desa-desa dan berbagai mata pencaharian. Akan tetapi penulis hanya akan mengambil dua contoh desa didalamnya yang akan penulis bahas dan perbandingkan hasilnya dalam hal kesejahteraan setelah adanya program PNPM Mandiri Perkotaan. Dua desa tersebut adalah Desa Galang

---

<sup>35</sup> Diambil dari *Pedoman Teknis PNPM MP tahun 2007* yang menjelaskan secara umum tentang PNPM-MP di Kabupaten Pekalongan

Pengampon dan Desa Gondang Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

1. Pelaksanaan “Pinjaman Bergulir” di Desa Galang Pengampon

1) Sistem Kerja “Pinjaman Bergulir”

Kemiskinan adalah masalah yang sangat besar diseluruh wilayah Indonesia dan tidak mudah untuk mengatasinya. Pemerintah lewat PNPM MP hadir untuk menangani masalah tersebut dengan memberdayakan potensi yang ada di masyarakat. dari menemukenali, merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi semua kegiatan.

Melihat Kondisi Kemiskinan di Desa Galang Pengampon yang masih banyak kondisinya sangat meprihatinkan maka perlu upaya untuk membuat mereka terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk itulah PNPM membuat perencanaan jangka menengah bersama tokoh tokoh masyarakat dari perwakilan tiap-tiap RT dalam upaya memecahkan masalah tersebut.

Masalah kemiskinan di Desa Galang Pengampon sangat komplek mulai dari PHK, Sulit mencari kerja, upah kerja rendah, pemasaran sepi, kurang modal, dan keahlian yang minim menjadi penyebab kemiskinan yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Oleh karena itu, melalui program penanggulangan kemiskinan (PNPM MP) akan mengupayakan

sumber pendapatan tambahan bagi keluarga miskin yang ada di Desa Galang Pengampon, dengan cara mengoptimalkan potensi atau keahlian yang dimiliki oleh warga miskin dalam sebuah kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa Galang Penagampon adalah salah satu desa yang terdapat didalam kecamatan Wonopronggo Kabupaten Pekalongan, yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Karena bermatapencaharian sebagai petani, masyarakat Galang Pengampon hanya mengandalkan lahan sawah yang menjadi fondasi dalam kehidupannya. Apabila sawah yang diandalkan tersebut tidak mampu menghasilkan apa yang dituju oleh masyarakat, maka kehidupan perekonomian mereka dalam memenuhi kebutuhan akan terganggu.

Dalam suatu kondisi dimana keadaan yang menyulitkan para petani untuk mengembangkan hasil pertanian karena disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang masih minim bagi para petani, adanya program PNPM MP membawa solusi bagi para petani dalam hal pemenuhan faktor-faktor produksi, terutama dalam hal pemenuhan permodalan. Karena hadirnya PNPM MP mampu memberi solusi terutama dalam hal pemecahan dana yang selama ini mereka butuhkan untuk

mengembangkan hasil pertanian yang lebih baik. Masa-masa sekarang ini terdapat banyak lembaga-lembaga yang bertujuan untuk memenuhi modal usaha masyarakat namun tidak luput dari unsur laba didalamnya. Lembaga-lembaga profit yang hanya mencari keuntungan semata mungkin hanya akan menambah beban bagi masyarakat desa. Akan tetapi setelah adanya PNPM MP, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Program yang ditawarkan PNPM MP adalah program “Pinjaman Jasa Bergulir”.

### **Visi**

Menurunkan Angka Kemiskinan Sampai 2 % pertahun di Desa Galang Pengampon.

### **Misi**

- Menciptakan kepedulian terhadap masyarakat miskin di Desa Galang Pengampon
- Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
- Membantu warga miskin dalam berwira usaha sesuai potensi yang ada, berwawasan luas dan lingkungan yang sehat.

Program “Pinjaman Jasa Bergulir” PNPM MP di Desa Galang Pengampon pada mulanya adalah kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemajuan perekonomian masyarakat semata. Namun didalamnya terdapat perjanjian atau

kesepakatan antara kreditur PNPM MP dengan debitur yaitu masyarakat miskin dalam pengembaliannya. Dalam pengembaliannya terdapat kelebihan yang disyaratkan atau diucapkan sendiri oleh warga masyarakat tanpa adanya ketentuan berapa persen atau berapa nominal pengembaliannya. Masyarakat memberikan pengembalian tanpa adanya paksaan sedikitpun dari pihak PNPM MP. Kemudian hasil kelebihan dari masyarakat tersebut digunakan untuk biaya operasional dan sisanya dikembalikan lagi pada masyarakat untuk kesejahteraan dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah skim pinjaman jasa bergulir di Desa Galang Pengampon Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan:

Skim Pinjaman yang diatur dalam “Pinjaman Bergulir” (yang dinamakan sistem “Sender Sawah”) oleh PNPM MP antara lain:

- a) Peminjam adalah KSM dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil survei lapangan yang tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan kriteria kemiskinan yang telah disepakati bersama)

- b) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pelatihan pengembangan ekonomi lokal)
- c) Besar pinjaman diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan persetujuan BKM melalui UPK/ UPS sesuai dengan kemampuan peminjam.
- d) Jangka waktu pinjaman paling lama pada saat musim panen tiba sesuai dengan kondisi lapangan dan kesepakatan bersama.
- e) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, atau diberikan pada saat musim panen, minimal dengan modal awal yang dipinjam kembali utuh.
- f) Jasa pinjaman diserahkan kepada pihak peminjam sesuai dengan hasil panen yang didapat.
- g) Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah bebas tergantung besar kecilnya hasil yang didapat
- h) Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, gaji pengelola yang disepakati bersama masyarakat) mengingat *form* pembukuan yang digunakan cukup banyak.

- i) Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam.

Sistem pinjaman diatur secara bergilir (peminjam yang sudah lunas tidak diperkenankan meminjam lagi, dengan asumsi masih terdapat daftar tunggu, kecuali jika daftar tunggu telah habis) sesuai dengan kesepakatan BKM dan keseluruhan masyarakat serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

Keuntungan (Laba) minimal dapat menutup biaya operasional untuk membiayai kegiatan BKM dan lainnya , dan untuk pemupukan modal (d disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD).

Dari hasil yang didapat pertahun dialokasikan sebagai berikut berdasarkan kesepakatan bersama

- |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| - Kegiatan social                    | 10% |
| - Kegiatan lingkungan                | 50% |
| - Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal) | 25% |
| - BOP BKM                            | 5%  |
| - Biaya Operasioanl Pengawas         | 10% |

Dasar pertimbangan diatas

- Bahwa kebutuhan masyarakat untuk porsi kegiatan lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan hasil perencanaan yang tertuang dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan(PJM Pronangkis)
- Kegiatan sosial diberikan kepada orang miskin yang tidak mampu seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang mampu, dan jompo sesuai kesepakatan bersama masyarakat.

2) Tujuan dilaksanakan “Pinjaman Bergulir” di Desa Galang Pengampon

- a) Secara umum tujuan yang ingin dicapai yaitu menciptakan desa yang mandiri dan tangguh dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- b) Tujuan khusus :
  - Terwujudnya masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri terutama dalam bidang ekonomi.
  - Memberikan pelayanan kesehatan bagi KK miskin dengan kualitas baik dan terjangkau.
  - Meningkatkan pendidikan di desa di Galang Pengampon.

- Menciptakan kerja sama dan kepercayaan antar warga.

Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembangunan selanjutnya karena masyarakat diharapkan untuk bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain.

Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM adalah pada koridor penanggulangan kemiskinan yang bertujuan mewujudkan perubahan sosial masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut:

- Bermanfaat bagi warganya
- Memberikan peningkatan ekonomi
- Perubahan perilaku
- Lingkungan tertata
- Permasalahan dapat terselesaikan

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan BKM mampu secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan BKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama masyarakat miskin. Tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Galang Pengampon.

## 2. Pelaksanaan "Pinjaman Bergulir" di Desa Gondang

### 1) Sistem Kerja "Pinjaman Bergulir"

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, beragam kebersamaan tiga pilar utama pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli (LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya) sangat diperlukan. Kebersamaan tersebut mutlak diperlukan karena diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kepentingan dan program ketiga pilar tersebut yang pada

akhirnya mampu mempercepat proses penanggulangan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Mandiri Perkotaan (PNPM MP) adalah salah satu program yang menggunakan strategi pendekatan penguatan kelembagaan lokal dari masyarakat warga dan mendorong potensi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara mandiri. Untuk itulah di bangunlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang bersifat independen dan bercirikan sebagai paguyuban masyarakat yang berfungsi sebagai dewan pengambil kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan, maka untuk itulah disusunlah suatu Program Penanggulangan Kemiskinan dalam sebuah perencanaan partisipatif yang tertuang dan teraplikasi dalam **Perencanaan Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)**.

PJM Pronangkis sebagai produk rencana masyarakat memiliki dimensi waktu rencana yang perlu dievaluasi dan direview secara berkala untuk mencapai kesempurnaan dan sesuai kebutuhan dimasyarakat. Adapun kegiatan tersebut minimal dilakukan satu tahun sekali oleh masyarakat bersama pemerintah baik secara teknis maupun substansi untuk menggali usulan bersama dan mencapai kesepakatan bersama khususnya dalam

mengatasi permasalahan kemiskinan dan dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun materiil.

Orientasi kebijakan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) turut andil dan menjadi pijakan dalam penyusunan PJM pronangkis diseluruh wilayah, yang antara lain memiliki tujuan yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi hiv/aids, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Seiring dengan hal tersebut, PJM Desa Gondang yang telah disusun telah mengacu dengan delapan tujuan diatas dan telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dimasyarakat dan tentunya tidak lepas dari aspek tridaya yaitu sosial, ekonomi dan fisik. Terkait dengan adanya kegiatan review PJM Desa Gondang yang telah berjalan selama satu tahun lebih, tentunya BKM Desa Gondang akan mengalami banyak perubahan-perubahan baik yang direncanakan maupun tidak, begitu pula dengan program, ada program yang berjalan sesuai rencana dan

mencapai hasil yang diinginkan dan mungkin juga ada yang tidak. Oleh karena perlu dilakukan review PJM Pronangkis yang ada baik program maupun rentas tahun-tahun sesudahnya dengan tetap mempertimbangkan aspek tridaya.

Dengan adanya kegiatan review, diharapkan BKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja di antara para anggota dan unit pengelola serta sebagai proses pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan BKM kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan kemiskinan terutama masyarakat miskin. Tak kalah pentingnya mampu menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran, memperkuat implementasi nilai-nilai keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban dan mendorong terjadinya kontrol sosial warga terhadap program-program pembangunan serta terwujudnya komitmen bersama untuk menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan khususnya di Desa Gondang.

Kegiatan review merupakan kegiatan peninjauan kembali terhadap seluruh rangkaian program yang harus dilakukan khususnya PJM Pronangkis untuk mencapai kesempurnaan dan sesuai kebutuhan dimasyarakat. Secara umum proses review PJM Pronangkis di Desa Gondang diawali dengan sosialisasi

terhadap BKM tentang kegiatan review partisipatif baik review kelembagaan, keuangan maupun PJM pronangkis. Khusus dalam kegiatan review PJM pronangkis di Desa Gondang dimulai dengan pembentukan tim review yang sebelumnya dilakukan penguatan terhadap tim tersebut tentang proses yang akan dilakukan. Tim review akan bertugas untuk mengadakan penggalan usulan ditingkat basis baik RT yang kemudian dilakukan *rekapitulasi* tentang usulan yang ada. Setelah semua telah direkap dan *ditabulasi* kedalam format yang ada kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk menyepakati program usulan baik mengenai program, perkiraan biaya dan kapan program tersebut akan dilaksanakan, dan hal ini jelas telah melalui proses *skoring* untuk menentukan skala prioritas usulan program. Dalam penggalan usulan tingkat basis juga dilakukan *reorientasi PS* untuk mengupdate data KK miskin serta *reorientasi PJM* dan *renta* yang telah disusun dan dilaksanakan sebelumnya. Reorientasi ini bermaksud untuk melakukan kajian ulang tentang KK miskin yang sudah maupun belum masuk kedalam data, serta mengkaji ulang tentang program mana yang belum dan sudah dilaksanakan pada periode tahun-tahun sebelumnya. Dari proses yang telah dilakukan kemudian didapatkan hasil review yang kemudian dikomparasikan dengan

program Desa Gondang untuk mencapai sinergi dan kesepahaman bersama agar tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil yang didapatkan kemudian dilakukan lokakarya di tingkat desa untuk penyepakatan bersama tentang hasil review PJM dan kemudian disahkan bersama BKM dan Kepala desa untuk dijadikan acuan pembangunan bagi Desa Gondang dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya demi mencapai kemnadirian bagi masyarakat Desa Gondang.

### **Visi**

Melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dengan semangat kebersamaan menuju masyarakat yang berdaya, mandiri, dan madani serta menurunkan angka keluarga miskin di Desa Gondang berkurang 2,5 % pertahun.

### **Misi**

- Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan modal.
- Menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
- Meningkatkan ikatan dan kepedulian sosial masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan.

- Meningkatkan kualitas pendidikan, terciptanya pendidikan dasar 9 tahun
- Meningkatkan jaminan kesehatan terhadap gerakan sayang ibu dan ibu hamil serta teratasinya kondisi gizi buruk masyarakat.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan madani
- Membantu KK miskin melalui program-program yang telah direncanakan bersama melalui konsep pemberdayaan untuk menuju kemandirian masyarakat yang berkelanjutan dan madani

Skim Pinjaman yang diatur dalam “Pinjaman Bergulir” antara lain :

- 1) Peminjam adalah KSM dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (warga miskin dan sesuai dengan hasil survei lapangan yang tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan kriteria kemiskinan yang telah disepakati bersama)
- 2) Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan peluang usaha (tujuan untuk peningkatan

ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan pelatihan pengembangan ekonomi lokal)

- 3) Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam. Pinjaman selanjutnya maksimal Rp. 2.000.000,- (Diluar jumlah maksimal tersebut peminjam dapat diberikan pinjaman dengan pola *channeling* dengan Lembaga keuangan/bank lainnya) *frekuensi* peminjaman maksimal 4 kali.
- 4) Jangka waktu pinjaman 10 bulan, tergantung dari perputaran usaha peminjam (hasil kesepakatan masyarakat) (dalam program banyak pilihan 10 minggu, 10 bulan atau ketentuan lainnya sesuai kesepakatan bersama)
- 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa *grace period* (tenggang waktu)
- 6) Jasa pinjaman 1,75 % per bulan, dihitung dari pokok pinjaman semula.
  - Jenis jasa pinjaman yang digunakan adalah jasa pinjaman tetap (*flat*) seperti contoh diatas
  - Jasa pinjaman minimal harus dapat menutup seluruh biaya operasional UPK (baik untuk alat tulis, fotocopy, print yang disepakati bersama masyarakat) mengingat *form* pembukuan yang digunakan cukup banyak

- Kalau dirasa masih belum cukup perlu disepakati bersama seluruh warga dengan tidak memberatkan warga khususnya peminjam.

Dasar untuk menetapkan besarnya jasa pinjaman:

Besarnya seluruh penerimaan jasa pendapatan (1 tahun) harus dapat menutup seluruh biaya UPK selama 1 tahun, yang terdiri antara lain :

a. Biaya dana (seandainya ada/biaya jasa tabungan) - pertahun	6	%
b. Biaya operasional UPK pertahun	6	%
c. Biaya cadangan resiko pinjaman pertahun	5	%
d. Keuntungan yang diharapkan <u>pertahun</u>	<u>10</u>	<u>%</u>
Jumah pertahun	21	%

$$21\%/12 \text{ bulan} = 1,75 \%/ \text{bulan}$$

Pembagian Keuntungan (Laba)

Keuntungan (Laba) minimal ditentukan 10 % pertahun.

Keuntungan/Laba inilah yang dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan BKM dan lainnya untuk pemupukan modal (d disesuaikan dengan aturan yang ada dalam AD).

Dari hasil 10% pertahun dialokasikan sebagai berikut

- Kegiatan social	10%
- Kegiatan lingkungan	50%
- Kegiatan ekonomi (Pemupukan modal)	25%
- BOP BKM	5%
- Biaya Pengawas	10%

Dasar pertimbangan diatas

- Bahwa kebutuhan masyarakat untuk porsi kegiatan lingkungan yaitu pembangunan infrastruktur cukup besar berdasarkan hasil perencanaan yang tertuang dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan
- Kegiatan social diberikan kepada orang miskin yang tidak mampu seperti anak yatim, beasiswa prestasi tapi kurang mampu, dan jompo sesuai kesepakatan bersama masyarakat
- Kegiatan ekonomi untuk pemupukan modal sangat penting mengingat bahwa perguliran ekonomi ini merupakan roda utama dalam kegiatan pembanguna selanjutnya karena

masayarakat diharapkan untuk bias mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pihak lain.

2) Tujuan Dilaksanakan “Pinjaman Bergulir” di Desa Gondang

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya Desa Gondang terbentuknya desa yang mandiri dan madani dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya ekonomi kerakyatan dengan konsep pemberdayaan, sehingga masyarakat dapat melakukannya sendiri
- Membantu masyarakat agar lebih mudah dan cepat melakukan kegiatan ekonomi
- Masyarakat tergerak untuk saling peduli dan kerjasama dalam hal pemenuhan kebutuhan yang saling menguntungkan
- Membentuk pelayanan kesehatan bagi KK miskin dengan kualitas baik dan terjangkau
- Meningkatkan pendidikan non formal seperti ketrampilan, kursus, dan lain-lain.
- Menuntaskan dan ikut membantu pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan wajar 9 tahun.

- Meningkatkan gizi balita, ibu hamil dan menyusui

Sehingga masyarakat diberi modal untuk dikembangkan secara mandiri dan berkelanjutan yang tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang mana direncanakan dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri dan hasilnya adalah untuk masyarakat khususnya warga miskin melalui pembelajaran dan pemberdayaan secara mandiri. konsep awal sampai akhir program PNPM adalah pada koridor penanggulangan kemiskinan yang bertujuan mewujudkan perubahan social masyarakat dan penataan lingkungan hunian yang sehat dan bertumpu pada hal sebagai berikut: bermanfaat bagi warmis, memberikan peningkatan ekonomi, perubahan perilaku, lingkungan tertata, dan permasalahan dapat terselesaikan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Diambil dari *Pedoman teknis "Pinjaman Bergulir" PNPM MP Kecamatan Wonopringgo khususnya Desa Galang Pengampon dan Desa Gondang*